



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2023-2024**

SELASA, 3 OKTOBER 2023

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,*

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah berhasil menyelesaikan pembahasan 2 (*dua*) Rancangan Undang Undang menjadi Undang Undang dan menyetujui 2 (*dua*) Rancangan Undang Undang menjadi Rancangan Undang Undang Usul DPR RI.

- 2 (*dua*) Rancangan Undang Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang, yaitu:
 1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN); dan

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2 (*dua*) Rancangan Undang Undang yang telah disetujui menjadi Rancangan Undang Undang Usul DPR RI, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Terhadap pembahasan 12 (*dua belas*) Rancangan Undang Undang yang masih dalam proses pembahasan Tingkat I, telah menjadi komitmen bersama antara DPR RI dengan Pemerintah untuk segera dapat menyelesaikannya.

DPR RI, melalui Badan Legislasi, telah melakukan evaluasi kedua Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dan

Perubahan ke-enam Prolegnas Tahun 2020-2024, dan menyetujui :

1. Mengeluarkan 6 (*enam*) RUU dari Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023 serta memasukkan 1 (*satu*) RUU ke dalam Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023;
2. Memasukkan 3 (*tiga*) RUU ke dalam Prolegnas RUU Perubahan ke-enam Tahun 2020-2024; dan
3. Menetapkan Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2024 sebanyak 47 (*empat puluh tujuh*) RUU beserta 5 (*lima*) Daftar RUU Kumulatif Terbuka

Fungsi legeslasi DPR RI, merupakan bagian dari politik hukum nasional, yang bertujuan untuk melaksanakan amanat UUD NRI 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum, maka seluruh penyelenggaraan negara, kekuasaan aparatur negara, kegiatan masyarakat di bidang ekonomi, politik, sosial,

budaya, religi, dan lain sebagainya harus diatur oleh hukum dalam bentuk Undang-Undang.

Pembentukan suatu Undang-Undang, tidak terlepas dari berbagai kepentingan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa Undang Undang yang dibentuk bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara, maka diperlukan komitmen bersama antar pembentuk Undang Undang, DPR RI dan Pemerintah, untuk selalu selaras dengan amanat UUD NRI 1945, selalu berpihak pada kepentingan nasional, serta selalu memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin berdaulat, maju, dan berkeadaban.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tahun 2024, merupakan tahun anggaran terakhir dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Sehingga Undang Undang APBN Tahun Anggaran 2024, disusun untuk dapat menuntaskan berbagai program prioritas sehingga dapat meninggalkan *legacy* landasan yang kuat bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan APBN Tahun Anggaran 2024, Pemerintah harus dapat menjaga kondisi ekonomi makro yang kondusif dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, inflasi yang terkendali, meningkatkan investasi, dan dapat mengantisipasi transmisi tekanan perekonomian global ke domestik.

Pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa APBN Tahun Anggaran 2024, akan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas belanja (*spending better*), mempertajam subsidi tepat sasaran, mengefektifkan program perlindungan sosial, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta mempermudah kehidupan rakyat di berbagai bidang.

Adapun postur APBN 2024 yang telah disepakati yaitu Pendapatan Negara sebesar Rp2.802,2 triliun, Belanja Negara mencapai Rp3.325,1 triliun dan Defisit Anggaran ditetapkan sebesar 2,29 persen terhadap PDB.

Postur APBN Tahun Anggaran 2024 tersebut, telah berada dalam desain Fiskal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pemerintah dalam menjalankan Undang Undang APBN 2024 juga harus tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, tata kelola yang baik, efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Fenomena El Nino yang dalam beberapa bulan ini terjadi telah mengakibatkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada perubahan iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia.

Dampak yang sudah dirasakan saat ini adalah kekeringan yang berdampak pada turunnya produksi pertanian dan lonjakan harga bahan pangan; serta mulai timbul kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di beberapa wilayah.

Pemerintah hendaknya mempersiapkan langkah-langkah antisipatif agar kemarau panjang ini tidak berdampak membebani rakyat. Kerja sama dan koordinasi yang baik antarberbagai pihak, antara lain BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik, Badan Pangan Nasional, serta kementerian/lembaga lain yang terkait sangat dibutuhkan untuk melakukan mitigasi.

Fungsi pengawasan DPR RI, selalu diarahkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan Undang Undang dan menangani urusan-urusan rakyat.

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti beberapa permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, diantaranya:

1. Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 kepada pemilih pemula dan Pengamanan Pemilu Tahun 2024;
2. Pembentukan Satgas dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat;
3. Rencana penggantian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan Pertamina Green 92 pada awal tahun 2024;
4. Biaya penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji 2024;
5. Pembangunan konstruksi dan rekonstruksi jalan di wilayah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara;
6. Fenomena penyelundupan benih lobster ke luar negeri dan kenaikan harga pakan jagung yang terus melambung tinggi;

7. Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) untuk meningkatkan kualitas ekosistem siber di Indonesia serta mengidentifikasi dan mencegah kebocoran data;
8. Akselerasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
9. Pembangunan infrastruktur desa yang masih memprihatinkan;
10. Permasalahan investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau;
11. Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Pemerintah wajib menindak lanjuti setiap rekomendasi DPR RI yang dihasilkan melalui Rapat Kerja bersama Kementerian/lembaga Pemerintah.

Tindak lanjut Pemerintah atas rekomendasi DPR RI, menunjukan sikap saling menghormati kedudukan Pemerintah dan DPR RI yang setara.

Melalui fungsi *check and balances* DPR RI terhadap pemerintahan, maka diharapkan rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi, membantu, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.

DPR RI juga telah menyampaikan Rekomendasi Laporan Hasil Kerja Panja kepada Pemerintah terkait Pengawasan terhadap Penanganan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Pengawasan terhadap Vaksin Covid-19.

Selain itu, pada masa persidangan ini DPR RI telah melakukan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap 7 (*tujuh*) orang Calon Hakim Konstitusi Tahun 2024 dan pemberian pertimbangan terhadap 20 (*dua puluh*) calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada masa sidang ini DPR RI melalui BKSAP telah melakukan serangkaian kegiatan, termasuk memperkuat

hubungan bilateral, mengikuti sidang, dan memimpin jaringan parlemen regional maupun internasional untuk membahas beragam isu serta permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat global.

Peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 juga semakin menegaskan kontribusi parlemen dalam pembangunan kawasan Asia Tenggara. Melalui Sidang Umum ke-44 AIPA yang sukses diselenggarakan pada bulan Agustus lalu, kita semakin optimis bahwa Indonesia dapat lebih berperan di ASEAN.

DPR RI juga melakukan pertemuan-pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari parlemen Turki, Kroasia, Amerika Serikat, dan Armenia.

Penguatan hubungan bilateral juga dilakukan melalui pertemuan dengan Duta Besar Ceko dan Duta Besar Kroasia untuk Indonesia, serta kunjungan ke Timor-Leste, Ceko, Azerbaijan, dan Oman guna membahas berbagai potensi kerja sama strategis.

DPR RI akan terus berupaya untuk dapat melaksanakan tugas diplomasi antar parlemen, sehingga Indonesia memiliki posisi politik luar negeri yang semakin kuat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada saat ini, kita telah menjalankan tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Semua partai politik peserta Pemilu 2024 akan melakukan berbagai persiapan.

Anggota DPR RI yang juga adalah anggota dari Partai Politik, akan berada dalam situasi dan kondisi dinamika politik menghadapi pemilu 2024.

Menjadi harapan kita semua, walaupun berada dalam tahun politik, kita dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional DPR RI tetap berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat; menyejahterakan rakyat; dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

DPR RI berkomitmen untuk dapat mengawal setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik sehingga Pemilu 2024 akan berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Atas nama seluruh Pimpinan DPR RI, saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh Anggota DPR RI yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat.

Saatnya kita memasuki masa reses, untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia.

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 DPR RI

memasuki Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.

Selamat memasuki masa reses, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbinganNya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

Lampiran:

- **2 (dua) Rancangan Undang Undang menjadi Undang Undang, yaitu:**
 1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN); dan
 2. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- **2 (dua) Rancangan Undang Undang menjadi Rancangan Undang Undang Usul DPR RI, yaitu:**
 1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
 2. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

➤ **RUU dalam Pembahasan Tingkat I:**

1. Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Rancangan Undang Undang tentang Hukum Acara Perdata;
4. Rancangan Undang Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
5. Rancangan Undang Undang tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Rancangan Undang Undang tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri;
9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

10. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence*);
11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa);
12. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

➤ **Calon Hakim Konstitusi Tahun 2024 yang terpilih:**

Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si,Pr.M.

➤ **Kegiatan Diplomasi Parlemen yang telah dihadiri oleh delegasi DPR RI, antara lain:**

1. *Seminar on National Parliament, Democracy, and International Relations* pada 30 Agustus-2 September 2023 di Dili, Timor Leste.
2. *Sidang Open Government Partnership (OGP) Global Summit ke-8* pada 5-7 September 2023 di Tallinn, Estonia.
3. *Konferensi Anggota Parlemen Muda se-Dunia Ke-9 atau 9th Global Conference of Young Parliamentarians* pada 15-17 September 2023 di Hanoi, Vietnam.
4. *Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and Cultural Affairs* pada 19-24 September 2023 di Baku, Azerbaijan.